KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lindungi pekerja migran, ubah penempatan PMI jadi berbasis sertifikasi
Tanggal : Selasa, 14 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Pekerja Migran

Ubah Penempatan PMI Jadi Berbasis Sertifikasi



Putih Sari

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mendorong Pemerintah mengubah transformasi kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jadi berbasis keterampilan khusus. Langkah ini untuk mengurangi dominasi pekerja sektor domestik seperti asisten rumah tangga di luar negeri.

Menurutnya, kebijakan baru itu diproyeksikan bakal meningkatkan standar perlindungan serta kesejahteraan pekerja migran secara menyeluruh. Perbaikan regulasi diharapkan mampu meminimalisir risiko kerja yang sering menimpa tenaga kerja Indonesia.

PMI dengan keterampilan khusus dipastikan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di negara tujuan. Mereka berpeluang memperoleh upah layak serta jaminan keamanan kerja yang jauh lebih baik. "Akses terhadap pekerjaan formal akan terbuka luas jika mereka dibekali kompetensi mumpuni," ujarnya, kemarin.

Dia bilang, transformasi besar ini wajib dimulai sejak tahap pra-penempatan, dengan penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja global yang dinamis. Pendekatan lama yang hanya berorientasi pada kuantitas penempatan harus segera ditinggalkan demi kualitas kerja.

Perubahan paradigma ini, sambungnya, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah persaingan pasar global. PMI tidak lagi diposisikan sebagai tenaga kerja murah, melainkan tenaga profesional yang berkompeten. Standar kualitas PMI bisa naik kelas serta memenuhi kriteria kebutuhan industri internasional.

Komisi IX DPR, lanjutnya, terus mendorong Pemerintah agar kebijakan penempatan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya itu dilakukan agar perlindungan serta kesejahteraan PMI dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. "Target utamanya adalah melahirkan pekerja migran berkualitas tinggi dengan daya saing kompetitif," ucapnya.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Nurhadi mendorong peningkatan kualitas dan kemampuan bahasa asing PMI. Program SMK Go Global yang menargetkan 500 ribu tenaga kerja perlu diapresiasi secara terbuka. Namun, efektivitas program itu harus tetap fokus pada kualitas daripada sekadar angka. ■ PYB